

Ridhatullah Assya'bani

**POLITIK SEBAGAI TANGGUNG JAWAB:
Konstruk Pemikiran Tokoh Muslim
Abad Pertengahan**

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Amuntai, Banjarmasin
Email: rassyabani@gmail.com

Abstract: *The political discourse is indispensable from the human life. In terms of Islamic teaching, it implies a relation among individuals, or between individual and society, or among societies in order to be a basic value of solidarity building. Consequently, politics became a raison de etre for those who had primordial responsibility to the others. This article is to portray the Middle Age Muslim thinkers' arguments and their basic epistemologies on politics as responsibility. They argued partly that human being need the others to be shared living, and it was necessary to be 'political' with building a community. Furthermore, a political human being need to be responsible for what they deserve to do to the others.*

Keywords: *human, relation, politics, responsibility*

Abstrak: *Wacana politik memang tidak pernah surut dari perbincangan kaum intelektual, karena peran politik dalam kehidupan manusia tidak pernah bisa dipisahkan, seakan menjadi darah daging dalam diri manusia. Politik secara sederhana adalah relasi individu dengan individu lain, individu dengan suatu kelompok atau kelompok dengan kelompok lain. Jika dilihat dalam Islam, politik adalah basis nilai untuk menjalin solidaritas. Tepat pada titik ini politik sebagai tanggung jawab, dalam pengertian bahwa manusia bertanggung jawab terhadap manusia lain karena kodrat manusia adalah makhluk sosial. Sebagai penutup argumen-argumen tersebut, tulisan ini berusaha menelaah argumen dari tokoh pemikir muslim abad pertengahan sebagai basis epistemologi tentang politik sebagai tanggung jawab. Mereka menyatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, oleh karenanya menjadi sebuah keniscayaan untuk berpolitik dan membentuk sebuah kelompok-kelompok. Oleh sebab itu, manusia sebagai pelaku politik harus bertanggung jawab dengan tindakan yang ia lakukan.*

Kata kunci: *Manusia, relasi, politik, tanggung jawab*

PENDAHULUAN

Politik merupakan kajian yang sudah berumur mungkin seusia dengan umur manusia itu sendiri, maka dar itu ketika banyak pihak yang memberikan perhatian dan mendalami ilmu politik serta memberikan pendefinisian tentang apa itu politik. Pada dasarnya politik mempunyai makna yang multi-dimensi. Ada yang mengartikan politik sebagai kajian yang membahas tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Sedangkan pendapatnya J. Barents politik adalah membahas tentang kehidupan negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya (Barents, 1965).

Selain itu dalam Filsafat politik dijelaskan bahwa politik adalah perkara argumen moral, dalam pengertian bahwa dalam politik tersebut terdapat nilai kemanusiaan (*humaniora*). Membincang tentang antara filsafat moral dan filsafat politik setidaknya dalam dua hal: (1) filsafat

moral berkenaan dengan latar belakang untuk, dan batas-batas bagi filsafat politik. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan orang terhadap orang lain membatasi apa yang boleh mereka lakukan melalui aparatur negara, atau yang mereka lakukan untuk membentuk aparatur lain. Kita memiliki tanggung jawab moral satu sama yang lainnya, sebagian diantaranya adalah tanggung jawab publik. (2) setiap penilaian tentang tanggung jawab publik harus cocok dengan kerangka moral yang lebih luas, yang memberikan ruang dan dapat dipahami oleh tanggung jawab privat (Kymlicka, 2004).

Melihat pengertian diatas bahwa politik hanya sebatas tentang ketata-nergaraan, tugas-tugas negara, stuktur kenegaraan dan lain sebagainya. Ada yang terlupakan dari itu yakni politik sebagai 'tanggung jawab'. Tanggung jawab berarti bahwa siap menerima kewajiban atau tugas. Artinya, ketika seseorang diberikan kewajiban atau tugas, seseorang tersebut akan menghadapi suatu pilihan, yaitu menerima dan menghadapinya dengan dedikasi atau menunda dan mengabaikan tugas atau kewajiban tersebut.

Namun, dalam tulisan ini memfokuskan permasalahan pada kata 'politik' sebagai tanggung jawab sebagai eksistensi yang hakiki 'aku bertanggung jawab maka aku ada', dalam pengertian tanggung jawab antara relasi individu dengan individu lain, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karenanya penulis mencoba mencari pemaknaan baru tentang 'politik' sebagai tanggung jawab dengan menilik pemikiran tokoh muslim abad pertengahan.

PEMBAHASAN

Pengertian Politik

Politik secara etimologi adalah hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Definisi ini disampaikan oleh Harold Lass Well. Atau secara sederhana diartikan "*Who gets what, when, and how*" (Gani, 1987) Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu "politikus" dari akar kata "polis" yakni negara atau kota (Sinaga, 2013), juga dari bahasa latin yaitu politica yang telah digunakan sejak abad ke-5 SM berarti hingga kini telah digunakan lebih dari 25 abad.

Kota Athen merupakan pusat pemerintahan orang-orang Yunani Kuno. Mereka menganggap bahwa dunia ini hanya wilayah mereka saja dan disebut sebagai *Polis*. Setelah ia bergabung dengan kota Sparta, Thesallia, Corymhe, Mylirthos dan Samos, Konsep *polis* semakin luas, ia meliputi kota-kota yang baru bergabung itu. Ahli falsafah Yunani yang pertama memperkenalkan istilah ini ialah Plato (427-347 SM) dengan karyanya *Politeia* dan Arisroteles (384-322 SM.) dengan karyanya *Politica*. Inilah buku yang pertama kali ditulis yang membicarakan tentang politik dan merupakan perintis bagi kelahiran ilmu politik (Abidin, 1977).

Plato dan Aristoteles di dalam karya-karya mereka tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan ialah fitrah dan keperluan manusia pada setiap masa dan tempat karena manusia itu ialah makhluk yang senang-senang memerlukan hidup bermasyarakat. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya pemusatan kekuasaan pemerintahan (Abidin, 1977). Dengan demikian, secara sederhana, politik adalah relasi individu dengan individu lain, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama.

Husain Munaf dalam Ensiklopedi Indonesia menjelaskan bahwa perkataan politik dikenal dalam bahasa Latin sebagai *politica*, dalam bahasa Yunani *Politikus*, dalam bahasa Belanda *politiek*, dalam bahasa Perancis sebagai *politique*, dan dalam bahasa Inggris sebagai *politics* dan dalam bahasa Arab sebagai *siyasah*.

Jika kata politik sudah muncul sejak zaman Yunani, maka istilah *siyasah* dalam bahasa Arab juga muncul serentak dengan kelahiran negara Islam di Madinah. Kalau di Yunani istilah politik mempunyai arti pemerintahan atau kenegaraan. Sedangkan kata *siyasah* pada mulanya diartikan sebagai usaha dan ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah. Dan juga bermaksud pengurusan pemerintahan.

Istilah politik menurut para ulama dimaknai dengan dua arti: (1) secara umum, yaitu: menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syariat agama. Karena itu dikenal istilah *khilafah* yang berarti perwakilan atau pengganti Rasulullah untuk

menjaga agama dan mengatur dunia; (2) secara khusus, yaitu pendapat yang dinyarakan pemimpin, hukum dan ketetapan-keterapan yang dikeluarkannya, untuk menjaga kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang sudah terjadi atau untuk memecahkan masalah khusus (Qardhawi, 1995).

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik ialah instrumen manusia atau cara dan upaya menangani masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia dalam menyampaikan misinya.

Kalau kata politik dikaitkan dengan Islam maka politik Islam ialah aktivitas politik yang sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok, tepat pada titik ini politik sebagai kesadaran. Pendukung perpolitikan Islam ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam), karenanya maka dalam karegori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik (al-Bahnasawi, tt).

Dalam aspek politik perlu dicatat bahwa semasa Nabi, beliau telah mendirikan tatanan sosial politik Islam di Madinah. Namun setelah lebih dari tiga abad kemudian, para pemikir hukum baru mulai merumuskan teori politik mereka secara lebih sistematis. Di antara mereka yang al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, ibn Taimiyah dan ibn Khaldun.

Politik Menurut Pemikir Muslim Abad Pertengahan

Mengacu kepada pengertian sederhana tentang politik, yakni relasi individu dengan individu lain, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Ini berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, perlu bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pandangan al-Farabi (870-950 M),

filosof muslim yang banyak berbicara masalah kemaslahatan, meskipun ia bukan orang praktisi lapangan dalam urusan kemaslahatan. Ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain (al-Farabi, tt). Kemudian, Dalam pandangan al-Ghazali (1059-1111 H), manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karenanya mereka perlu hidup bermasyarakat dan bernegara. Menjadi keniscayaan untuk membentuk negara, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga persiapan untuk kehidupan akhirat.

Berdasarkan pandangan ini, membentuk negara merupakan perkara yang wajib dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan rasio, melainkan berdasarkan agama (*syar'i*). Ini dikarenakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat tidak tercapai tanpa pengalaman dan penghayatan agama secara benar. Oleh sebab itu, lanjut tutur al-Ghazali bahwa agama dan negara (pemimpin negara) bagaikan dua saudara kembar yang tidak lahir dari rahim seorang ibu. Keduanya saling melengkapi, bahkan al-Ghazali menegaskan bahwa politik (negara) menempati posisi yang strategis, yang hanya berada setingkat di bawah kenabian (al-Ghazali, 1994).

Selain itu, dalam pandangan ibn Taimiyah (1263 M), dengan menggunakan pendekatan sosiologi mengatakan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta kecuali hanya dalam satu tatanan sosial, dimana setiap orang bergantung pada yang lainnya. Oleh sebab itu, menjadi suatu keniscayaan seorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut (Taimiyah, tt).

Untuk itu mencapai tujuan bersama—kemaslahatan, keamanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya—tidak mungkin tanpa adanya yang memimpin atau mengepalai. Untuk itu, menjadi keniscayaan untuk memilih salah satu untuk memimpin jalannya proses pencapaian suatu tujuan dan bertanggung jawab terhadap umat yang ia pimpin. Misalnya dalam sebuah negara. Penetapan kepala Negara dalam pandangan al-Mawardi (974-1058 M) harus didasarkan pada kerelaan. Dalam pengertian bahwa kalau kandidat kepala Negara bersedia dipilih, maka

telah dimulailah sebuah kontrak sosial antara kepala negara dan masyarakat melalui *abl al-ikhtiyar* (Iqbal, 2010). Melalui kontrak ini lahir hak dan kewajiban secara simbiosis-mutualime (timbang-balik yang saling menguntungkan), antara kepala negara sebagai penerima amanah dan rakyat sebagai pemberi amanah. Di antara kewajiban kepala negara menurut al-Mawardi ialah menyampaikan amanah dan memperhatikan segala sesuatu yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap masyarakat dan memelihara agamanya (Al-Mawardi, tt). Selanjutnya, rakyat wajib taat kepada kepala negara selama ia menjalankan tugas dengan baik. Pendaptnya ini dilandaskan pada surah an-Nisa, 4: 59 yang mewajibkan taat kepada Allah, Rasulnya dan *ulul amri* (para pemimpin).

Oleh sebab itu, meminjam pernyataan ibn Khaldun (1332-1406 M) bahwa organisasi kemasyarakatan—negara dalam konteks global, ormas dalam konteks lokal—adalah suatu keharusan. Kodrat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Ia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya, seperti makanan yang ia makan, pakaian yang dikenakannya, sudah melibatkan orang lain. Tanpa orang lain keberadaan manusia tidak akan sempurna (Iqbal, 2010).

Kedudukan Manusia Di Muka Bumi

Allah menciptakan manusia untuk menempati bumi ini, bukan di surga sebagaimana yang ditempati Adam pada awalnya. Dengan proses yang terjadi, akhirnya Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi kita ini. Di bumi inilah manusia dapat berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Peran apa saja yang dimainkan manusia di bumi ini, Alquran menggariskan jangan sampai manusia keluar dari dua fungsi pokoknya, yakni:

1. Fungsi kekhalfahan (khalifah Allah). Kehadiran manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Khalifah bisa juga diartikan sebagai pemimpin. Karena itu, manusia harus dapat memerankan dirinya sebagai pemimpin di muka bumi ini. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah (2): 30:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbib dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.” (QS. al-Baqarah [2]: 30).

Kemudian Pernyataan Allah tentang fungsi ini juga bias dibaca dalam QS. Yunus (10): 14, QS. al-An’am (6): 165, QS. Fathir (35): 39. Fungsi kepemimpinan ini harus diperankan manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing yang banyak didukung oleh potensi kecerdasannya. Ada manusia yang dapat mencapai derajat kepemimpinan tertinggi, seperti presiden, gubernur, atau bupati, namun ada juga yang hanya mampu menjadi pemimpin atas dirinya sendiri.

2. Fungsi ibadah (hamba Allah). Di samping manusia harus menjadi khalifah di bumi, manusia juga harus melakukan fungsi utamanya, yakni beribadah kepada Allah. Allah Swt. Berfirman:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. al-Dzariyat [51]: 56).

Fungsi ibadah ini dapat dijalankan manusia sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui al-Quran dan juga yang dijelaskan oleh Nabi melalui hadisnya. Fungsi ini sangat didukung oleh potensi agama yang dimiliki manusia. Semakin tinggi potensi keagamaan manusia, maka akan semakin maksimal dia dapat beribadah kepada Allah.

Dua fungsi di atas harus berjalan bersama-sama dan tidak boleh manusia hanya menjalankan satu fungsi saja serta meninggalkan fungsi yang lain. Sebagai teladan manusia, Nabi Muhammad SAW. mencontohkan bagaimana melakukan kedua fungsi itu dalam kehidupan beliau, baik sebagai kepala negara maupun sebagai nabi, yang dua-duanya dijalankan dengan sebaik mungkin. Sebagai umatnya

kita pun harus meneladaninya dengan berusaha memaksimalkan kedua fungsi itu dalam kehidupan kita.

Politik Sebagai Tanggung Jawab

Berdasarkan pengertian tentang politik dan melihat pandangan para tokoh politik maka dapat dimaknai bahwa politik memiliki dua makna, yakni politik sebagai instrument manusia mencapai tujuan bersama dan Politik sebagai kesadaran. Politik sebagai instrumen manusia untuk menacapai tujuannya teraplikasi menjadi institusi formal maupun organisasi masyarakat. Institusi formal merujuk pada tubuh negara (badan peradilan, legislatif, birokrasi) dan peraturan negara yang memaksa (hukum, konstitusi, regulasi). sedangkan Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Adapun politik sebagai kesadaran, dalam pengertian bahwa manusia sebagai—subjek atau objek politik—menyadari pentingnya menjalin relasi dengan manusia lain dan bertanggung jawab terhadap orang lain. Tanggung jawab disini adalah bukanlah ‘akibat’ karena kita telah melakukan sesuatu. Kita bertanggung jawab karena kita sadar akan pilihan dan mempunyai rencana untuk diwujudkan. Tanggung jawab juga tidak sama dengan kewajiban. Tanggung jawab berasal dari pengetahuan, kesadaran, atau dari dalam diri kita (inheren). Tanggung jawab adalah tugas-tugas yang harus dikerjakakan berdasarkan perintah atau aturan yang kita terima. Singkatnya, tanggung jawab adalah ungkapan dari dalam diri kita yang keluar dalam bentuk tindakan. Kewajiban adalah internalisasi perintah atau aturan dari luar kedalam diri kita, atau dengan kata lain penerimaan kita atas apa yang diminta oleh pihak luar agar kita lakukan (Bolo, 2012).

Berkenaan dengan tanggung jawab, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam Hadistnya (Bukhari, tt):

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Seorang raja memimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang budak mengelola harta majikannya akan ditanya tentang pengelolaannya. Ingatlah bahwa kalian semua memimpin dan akan diminta pertanggung-jawabannya atas kepemimpinan itu (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist tersebut, pada dasarnya menekankan bahwa setiap manusia untuk selalu bertanggung jawab setiap apa yang dilakukannya, terlebih dalam perpolitikan, apa lagi ketika menjadi seorang pemimpin. Thomas Aquinas (1226-1274) merumuskan berdasarkan dengan basis teologis normatif, bagaimana seharusnya kekuasaan digunakan untuk tujuan tertentu. Menurutnya bahwa seorang penguasa negara memiliki kewajiban-kewajiban terhadap rakyat yang dikuasainya. Tugas penguasa negara yang utama adalah mengusahakan kesejahteraan dan kebajikan hidup bersama. Untuk itu, penguasa dituntut untuk memungkinkan rakyat memenuhi kebutuhan-kebutuhan material, diantaranya kebutuhan sandang dan pangan. Menjadi niscaya negara mengarahkan setiap kelas-kelas sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (Suhelmi, 2001).

Sebelum menjalankan sistem politik dalam sebuah negara, perlu menyiapkan dan memperkanalkan masyarakat yang demokratis kepada rakyat, kemudian mengajak untuk melaksanakan prinsip tersebut dengan penuh tanggung jawab. Prinsip masyarakat demokrasi tersebut berpijak pada nilai yang terkandung dalam konsep masyarakat sipil. Nilai-nilai tersebut menurut Bung Hatta adalah:

- Kemandirian dan tanggung jawab individu.
- Keterlibatan atau partisipasi masyarakat.
- Hubungan kooperatif antar individu yang mandiri dalam masyarakat.

Konsep '*civil society*' tak dapat dipahami tanpa nilai 'kemandirian dan tanggung jawab individu'. Kemandirian dan tanggung jawab individu dalam hal ini bukan berarti individualisme. Nilai inilah yang menyebabkan konsep *civil society* berbeda dari konsep masyarakat

lainnya, seperti masyarakat monarki. Kemandirian dalam hal ini bisa dijabarkan sebagai ‘mengenali pilihan yang ingin diambil dan mampu memilih hal yang diinginkan’. Amarty Sen, seorang ekonom menegaskan bahwa kita bebas jika kita bisa memilih. Kekampuan memilih menunjukkan kita bisa bertanggung jawab. Pemahaman seperti ini; ‘karena kita tahu apa yang dipilih atau apa yang akan dilakukan, maka kita akan bertindak seturut dengan pilihan dan rencana yang telah disusun’ (Bolo, 2012).

Penalaran kepedulian menganggap perhatian untuk orang lain dalam pengertian bahwa menerima tanggung jawab. Menurut Gilligan bahwa menerima tanggung jawab untuk orang lain mengisyaratkan perhatian positif berkenaan dengan kesejahteraan mereka, sementara hak pada dasarnya merupakan mekanisme perlindungan diri yang dapat dihormati hanya dengan membiarkan orang lain sendirian. Dengan kata lain, ia menyamakan perbicaraan hak individualisme dan pementing hak untuk orang lain terbatas pada non-intervensi timbal-balik (Kymlicka, 2004). Tidaklah mengejutkan bahwa pengertian tanggung jawab untuk tujuan-tujuan bersama merupakan perbedaan fundamental antara kepedulian dan keadilan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, makna politik dimensi ganda, yakni politik sebagai instrument manusia mencapai tujuan bersama dan politik sebagai kesadaran. Politik sebagai instrumen manusia untuk menacapai tujuannya teraplikasi menjadi institusi formal maupun organisasi masyarakat. Sedangkan politik sebagai kesadaran, ia menyadari adanya relasi antara dirinya dengan yang diisi dengan rasa tanggung jawab demi mencapai kesejahteraan bersama. Oleh sebab itulah tanggung jawab sebagai eksistensi yang hakiki ‘aku bertanggung jawab maka aku ada’, dalam pengertian tanggung jawab antara relasi individu dengan individu lain, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tanpa harus terjadi diskriminasi dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal. (1977). *Ilmu Politik Islam, Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Bahnasawi, Salim Ali. (t.t). *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka AI Kautsar.
- al-Farabi. (t.t). *Ara Abl al-Madinah al-Fadhiblah*. Mesir: Maktabah Matba'ah Muhammad Ali.
- al-Ghazali. (1994). *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulke*, terjem. Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail, *Nasehat Bagi Penguasa*. Bandung: Mizan.
- al-Mawardi. (t.t). *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Barents, J. (1965). *Ilmu Politik Suatu Perkenalan Lapangan*, Terj. L.M Sitorus. Jakarta: Pembangunan.
- Bolo, Andreas Doweng, dkk. (2012). *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gani, Sulistiyawati Ismail. (1987). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Iqbal, .Muhammad, dkk. (2010). *Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Kitab al-Ahkam, Bab Qaulullahi Ta'ala* (no. 7134), dan Muslim, bab Fadhilatul Imamul 'Adil wa 'Uqubatul Jar'ir (no. 1829).

- Kymlicka, Will. (2004). *Contemporary Political Philosophy: an Introduction*, terjem. Agus Wahyudi, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Teori Politik Islam*, terjem. Masrohi N. Surabaya: Risalah Gusti.
- Sinaga, Rudi Silam. (2013). *Pengantar Ilmu Politik: Kerangka Berpikir dalam Dimensi Arts, Praxis & Policy*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjadzali, Munawwir. (1990). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Suhelmi, Ahmad. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia.
- Taimiyah, Ibn. (t.t). *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah.